

**PENGARUH KETEPATAN SKEDUL PENYUSUNAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD) DAN SISTEM
PENGENDALIAN INTERN TERHADAP KINERJA
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SIAK**

Oleh :

Utary Aini

Pembimbing : Kirmizi Ritonga dan Sem Paulus

Fakultas Ekonomi Universitas Riau, Pekanbaru Indonesia

Email : eyesonutary@gmail.com

*The Effect of Budget Scheduling and Internal Control System of
Local Government Performance in Siak Regency*

ABSTRACT

Local government performance not separated from the local government budget. The performance of a government can be judged from the budget. One of accuracy in budgeting. And in the implementation of the budget on time, internal control systems are also needed so that everything stays in control. The goal of this research is conducted to explore whether there is empirical evidence about the effect of budget scheduling and internal control system of local government in Siak Regency. The object of this study is Siak regency. This study performed on local government in SKPD Siak Regency with the second, third, and fourth echelon position. Primary data collection method conducted with survey technique by providing questions to respondents by the questionnaire. The result of this study showed that budget scheduling and internal control system had a positive and signifikan effect in performance of local government.

Keywords : Budget Scheduling, Internal Control System, Local Government Perormance.

PENDAHULUAN

Kinerja merupakan hasil kerja yang telah dicapai dari pelaksanaan suatu kegiatan dengan tujuan untuk mencapai sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi (Wiratna Sujarweni, 2015). Sedangkan kinerja pemerintah daerah merupakan gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijaksanaan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi yang

tertuang dalam perumusan skema strategis (*strategic planning*) suatu organisasi (Abdul Rohman, 2007). Dengan demikian dapat dikatakan bahwa kinerja pemerintah daerah merupakan tingkat pencapaian tujuan organisasi atau tingkat pencapaian hasil terhadap tugas dan fungsi yang dibebankan kepada organisasi tersebut. Kinerja dapat dikatakan suatu tingkatan sejauh mana proses kegiatan pemerintah daerah memberikan hasil atau mencapai tujuan.

Penilaian kinerja dapat diartikan sebagai penentuan secara periodik efektivitas operasional suatu organisasi, bagian organisasi dan karyawan berdasarkan sasaran, standar dan kinerja yang telah ditetapkan sebelumnya (Mulyadi, 2001). Bastian (2006) menambahkan pengukuran kinerja meliputi aspek-aspek antara lain kelompok masukan (*input*), kelompok keluaran (*output*), kelompok hasil (*outcome*), kelompok manfaat (*benefit*) dan kelompok dampak (*impact*).

Untuk dapat mengetahui apakah kinerja pemerintah daerah tersebut efektif harus dilakukan perbandingan terhadap anggaran. Anggaran merupakan titik awal terbaik dalam menilai kinerja. Anggaran berisi aktivitas-aktivitas yang akan dilakukan selama periode waktu tertentu sebagai acuan kegiatan organisasi dan menunjukkan tujuan operasi. Anggaran memiliki dua peranan penting yaitu sebagai perencanaan dan kriteria kinerja. Pemahaman terhadap tujuan anggaran dan informasi tentang seberapa banyak tujuan anggaran memberikan dasar bagi pemerintahan daerah untuk mengukur efisiensi, mengidentifikasi masalah, dan mengendalikan biaya. Anggaran disusun untuk menghasilkan anggaran yang benar-benar mencerminkan kepentingan dan pengharapan instansi dan pegawai terhadap pengelolaan keuangan instansi secara ekonomis, efisien, dan efektif. Menurut Mulyadi (2001) anggaran merupakan rencana yang dinyatakan secara kuantitatif, diukur dalam kesatuan moneter, atau ukuran yang lain dalam jangka waktu satu tahun.

Ketepatan skedul penyusunan anggaran merupakan tingkat kesesuaian waktu penyusunan anggaran yang telah dilaksanakan dibandingkan dengan kalender penyusunan anggaran yang telah ditetapkan dalam peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 yang telah diubah dengan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Apabila proses penyusunan anggaran sudah tidak sesuai dengan skedul yang telah ditetapkan maka sudah pasti akan membawa efek, berupa terlambatnya pengesahan dan pelaksanaannya. Rendahnya daya serap anggaran merupakan salah satu akibat dari terlambatnya pengesahan anggaran karena kegiatan yang telah direncanakan tidak dapat diselesaikan dalam 1 (satu) tahun anggaran, hal ini akan berdampak pada rendahnya kinerja SKPD dalam menyelesaikan kegiatan yang telah ditetapkan. Selain itu keterlambatan pengesahan APBD juga akan berdampak pada tertundanya penyaluran dana perimbangan, yakni dana alokasi umum (DAU) sebesar 25% dari pagu yang telah ditetapkan, sebagaimana yang disebutkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 46/PMK.02/2006.

Penetapan APBD harus dilakukan tepat waktu agar program kegiatan dan pembangunan yang direncanakan terealisasi pada tahun anggaran sehingga pemberian pelayanan publik terhadap masyarakat dapat berjalan dengan lancar (Keuda Kemendagri, Agustus 2013). Fenomena yang terjadi tercatat pada tahun anggaran 2012, terdapat 234 kabupaten dan kota yang mengalami keterlambatan

dalam menetapkan APBD dan tahun anggaran 2013 terdapat 185 kabupaten dan kota yang mengalami keterlambatan. Selain itu pada tahun anggaran 2012 terdapat 16 kabupaten yang menetapkan APBD terlambat dan dikenakan sanksi penundaan dana perimbangan dan terdapat 16 kabupaten dan satu kota dikenakan sanksi penundaan dana perimbangan pada tahun 2013 (Keuda kemendagri, Agustus 2013).

Menurut Wangi dan Ritonga (2010) keterlambatan pengesahan APBD disebabkan kurang harmonisnya hubungan eksekutif dan legislatif, pengaruhnya dari karakteristik yang dimiliki oleh eksekutif dan legislatif sebagai penyusun APBD serta faktor komitmen yang belum memadai. Untuk mengatasi hal ini maka dibutuhkan suatu sistem pengendalian intern yang mampu meminimalisir berbagai faktor yang memicu terhambatnya kinerja pemerintah.

Untuk meningkatkan kinerja pemerintah dibutuhkan suatu sistem pengendalian intern yang mampu mendukung kinerja pemerintah daerah. Sistem pengendalian intern merupakan suatu perencanaan yang meliputi struktur organisasi, metode dan ukuran-ukuran koordinasikan untuk menjaga kekayaan organisasi, mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi, mendorong efisiensi dan mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 sistem pengendalian intern adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai

atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundangundangan

Tidak dapat dipungkiri lagi bahwa proses penganggaran terjadi dalam lingkungan manusia dan beberapa faktor yang berkaitan dengan perilaku manusia. Siegel dan Marconi (1989) menegaskan bahwa penganggaran mempunyai dampak langsung terhadap perilaku manusia terutama bagi orang yang langsung terlibat dalam penyusunan anggaran. Hansen dan Mowen (2000) menyatakan bahwa penggunaan anggaran untuk pengendalian, evaluasi kinerja, komunikasi, dan meningkatkan koordinasi menyiratkan bahwa proses penganggaran merupakan aktivitas manusia, sehingga penganggaran membawa banyak dimensi perilaku.

Mengingat pentingnya ketepatan dalam penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah dan sistem pengendalian intern pemerintah, maka hubungan antara kinerja pemerintah daerah dengan variabel-variabel lainnya perlu dilakukan penelitian. Penulis menerapkan penelitian ini di Kabupaten Siak pada instansi pemerintah, karena sepengetahuan penulis penelitian ini belum pernah dilakukan di Kabupaten Siak. Oleh sebab itu, diharapkan penelitian ini dapat menambah wawasan tentang sektor publik dan menyempurnakan penelitian sebelumnya.

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut : 1). Apakah ketepatan skedul penyusunan anggaran berpengaruh terhadap kinerja Pemerintah Daerah

Kabupaten Siak, 2). Apakah sistem pengendalian intern berpengaruh terhadap kinerja Pemerintah Kabupaten Siak.

Berdasarkan atas permasalahan yang dirumuskan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk 1). Mengetahui dan menganalisis pengaruh ketepatan skedul penyusunan anggaran terhadap kinerja pemerintah daerah, 2). Mengetahui dan menganalisis pengaruh sistem pengendalian intern terhadap kinerja pemerintah daerah.

TELAAH PUSTAKA DAN HIPOTESIS

Kinerja Pemerintah Daerah

Kinerja adalah hasil atau tingkat keberhasilan seseorang secara keseluruhan atau kelompok selama periode tertentu di dalam melaksanakan tugas dibandingkan dengan berbagai kemungkinan, seperti standar hasil kerja, target atau sasaran atau kriteria yang telah ditentukan terlebih dahulu dan telah disepakati bersama sebelumnya (Basri & Rivai, 2005).

Menurut Stolovich dan Keeps (Basri & Rivai 2005) kinerja merupakan hasil yang dicapai dan merujuk pada tindakan pencapaian serta pelaksanaan suatu pekerjaan yang diminta. Kinerja (*performance*) adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan / program / kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi, visi organisasi yang tertuang dalam strategik *planning* suatu organisasi (Mahsun, 2006) Istilah kinerja sering digunakan untuk menyebut prestasi atau tingkat keberhasilan individu maupun kelompok individu. Kinerja biasa diketahui jika individu atau

kelompok individu tersebut mempunyai kriteria keberhasilan yang telah ditetapkan. Kriteria keberhasilan ini berupa tujuan-tujuan tertentu yang hendak dicapai. Tanpa tujuan atau organisasi tidak mungkin dapat diketahui karena tidak ada tolak ukur.

Kinerja pemerintah daerah adalah gambaran pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijaksanaan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi, dan visi pada pemerintah daerah (Bastian, 2006). Kinerja aparat pemerintah adalah suatu sistem yang bertujuan untuk membantu pimpinan dalam menilai pencapaian suatu strategi melalui alat ukur finansial dan non financial. Kinerja yang efektif adalah apabila tujuan dari anggaran tercapai dan partisipasi dari bawahan memegang peranan penting dalam mencapai tujuan.

Pengukuran kinerja merupakan alat untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan akuntabilitas. Dengan melakukan pengukuran kinerja maka kita bisa memastikan apakah pengambilan keputusan dilakukan secara tepat dan objektif. Selain itu, kita juga bisa memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kinerja dan membandingkannya dengan rencana kerja serta melakukan tindakan untuk memperbaiki kinerja periode berikutnya.

Ketepatan Skedul Penyusunan Anggaran

APBD adalah rencana keuangan yang dibuat pemerintah daerah setiap tahunnya, disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). APBD ditetapkan dengan peraturan

daerah. Tahun Anggaran APBD meliputi masa satu tahun, mulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember (Wiratna Sujarweni, 2015). Proses penyusunan APBD ini dimulai dari penyusunan RKPD pada akhir Mei hingga penetapan Perda APBD pada akhir Desember.

Proses anggaran diawali dengan penetapan tujuan, target dan kebijakan anggaran. Proses ini memerlukan waktu yang telah ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Kesamaan persepsi antar berbagai pihak tentang apa yang akan dicapai dan keterkaitan tujuan dengan berbagai program yang akan dilakukan, sangat krusial bagi kesuksesan anggaran. Pencapaian konsensus alokasi sumber daya menjadi pintu pembuka bagi pelaksanaan anggaran. Proses panjang dari penentuan tujuan ke pelaksanaan anggaran seringkali melewati tahap yang melelahkan, sehingga perhatian terhadap tahap penilaian dan evaluasi sering diabaikan. Kondisi inilah yang nampaknya secara praktis sering terjadi (Bastian, 2006).

Sistem Pengendalian Intern

Sistem pengendalian intern merupakan suatu perencanaan yang meliputi struktur organisasi dan semua metode dan alat-alat yang dikoordinasikan yang digunakan di dalam perusahaan dengan tujuan untuk menjaga keamanan harta milik perusahaan, memeriksa ketelitian dan kebenaran data akuntansi, mendorong efisiensi, dan membantu mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen yang telah ditetapkan.

Sistem pengendalian intern (SPI) menurut Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 adalah proses

yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundangundangan.

Menurut COSO *report* (2008) mendefinisi pengendalian intern adalah sebagai berikut: "Pengendalian intern mencakup rencana organisasi dan semua metode serta tindakan yang telah digunakan dalam perusahaan untuk mengamankan aktivitya, mengecek kecermatan dan keandalan dari data akuntansinya, memajukan efisiensi operasi, dan mendorong ketaatan pada kebijaksanaan-kebijaksanaan yang telah ditetapkan pimpinan"

Dapat disimpulkan bahwa Sistem Pengendalian Intern Pemerintah merupakan sistem pengendalian yang harus diterapkandalam lingkungan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam penyusunan laporan keuangan, serta dalam peningkatan kualitas laporan keuangan.

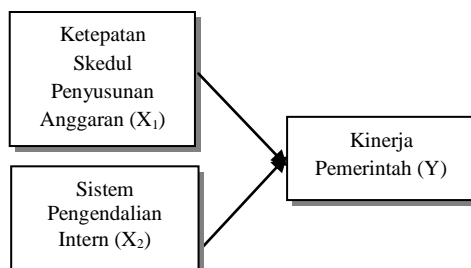
Pelaksana Sistem Pengendalian Intern (SPI) adalah 1). Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) yang terdiri dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, Inspektorat Jenderal, Inspektorat Provinsi dan Inspektorat Kabupaten/Kota, 2). Pengawasan langsung oleh atasan. Mulai dari menteri/gubernur, bupati/walikota dengan mengendalikan penyelenggaraan kegiatan pemerintah yang dilaukan terhadap

bawahannya dengan menerapkan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.

Model Penelitian

Berdasarkan landasan teori dan temuan empiris yang telah diuraikan, maka dapat disajikan model penelitian seperti pada gambar berikut ini :

Gambar 1
Model Penelitian



Sumber : Data Olahan, 2016

METODE PENELITIAN

Populasi dalam penelitian ini adalah SKPD yang ada di Kabupaten Siak yang berjumlah 29 SKPD. Sampel dalam penelitian ini adalah seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan pemerintah Kabupaten Siak yang berjumlah 29 SKPD. Responden dari penelitian ini adalah kepala dinas/instansi terkait dan sekretaris dinas/instansi atau perwakilan dari dinas tersebut dengan pertimbangan bahwa mereka adalah pihak yang berkompeten untuk memberikan jawaban sesuai dengan tujuan penelitian ini. Pada masing-masing SKPD peneliti akan mengirimkan 3 buah kuisioner. Sehingga jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 87 responden.

Seluruh populasi akan dijadikan sampel (metode sensus).

Untuk mendapatkan data yang diinginkan, maka dibuat kuisioner dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan secara terstruktur yang mana responden dibatasi dalam memberikan jawaban pada alternatif jawaban tertentu saja.

Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data primer yang merupakan data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber asli yaitu dengan mengisi kuisioner. Data tersebut berasal dari jawaban responden atas kuisioner yang dibagikan kepada responden dalam hal ini semua satuan kinerja instansi pemerintah daerah Kabupaten Siak. Sumber data penelitian ini adalah skor total yang diperoleh dari pengisian kuisioner yang telah dikirim kepada satuan kinerja instansi pemerintah daerah Kabupaten Siak.

Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan metode kuisioner. Kuisioner penelitian diadopsi dan dikembangkan atas kuisioner yang telah digunakan penelitian – penelitian terdahulu.

Hasil dan Pembahasan

Statistik Deskriptif

Analisis statistik deskriptif digunakan dalam penelitian ini untuk memberikan gambaran atau deskripsi mengenai variabel-variabel penelitian yaitu ketepatan skedul penyusunan anggaran, sistem pengendalian intern, dan kinerja pemerintah daerah. Berikut adalah

deskripsi statistik dari masing-masing variabel.

Tabel 1
Statistik Deskriptif

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Kinerja	81	26,00	50,00	39,0370	5,68429
Ketepatan Skedul Penyusunan Anggaran	81	12,00	30,00	24,5432	4,52507
Sistem Pengendalian Intern	81	72,00	130,00	104,4074	16,37130
Valid N (listwise)	81				

Sumber : Data Olahan, 2016

Berdasarkan Tabel 1, menunjukkan hasil pengukuran deskripsi statistik masing-masing variabel dari 81 data pengamatan. Pada tabel tersebut terlihat bahwa variabel kinerja pemerintah daerah memiliki kisaran empiris terendah sebesar 26,00 dan tertinggi sebesar 50,00. Rata-rata kinerja pemerintah daerah adalah 39,0370 dengan standar deviasi sebesar 5,68429.

Sedangkan pada variabel ketepatan skedul penyusunan anggaran dari Tabel 1 menunjukkan kisaran empiris terendah sebesar 12,00 dan tertinggi sebesar 30,00. Rata-rata ketepatan skedul penyusunan anggaran adalah 24,5432 dengan standar deviasi sebesar 4,52507.

Pada variabel ketepatan sistem pengendalian intern dari Tabel 1 menunjukkan kisaran empiris terendah sebesar 72,00 dan tertinggi sebesar 130,00. Rata-rata sistem pengendalian intern adalah 104,704 dengan standar deviasi sebesar 16,1730.

Uji Kualitas Data

Hasil Uji Validitas

Validitas merupakan konsep pengukuran yang digunakan untuk mengetahui sejauh mana ketepatan dan kecermatan suatu alat ukur

dalam melakukan fungsi ukurnya. Suatu instrumen dikatakan valid jika instrument tersebut menghasilkan hasil ukur sesuai dengan tujuan pengukurannya. Jika suatu item pernyataan dinyatakan tidak valid maka item pertanyaan itu tidak dapat digunakan dalam uji-uji selanjutnya (Indrianto dan Supomo, 2009). Pengujian validitas ini menggunakan *Total Correlation (Corrected Item)*, analisis ini dengan cara mengkolerasikan masing-masing skor item dengan skor total dan melakukan koreksi terhadap nilai koefisien korelasi yang overestimasi.

Hasil penelitian ini didapat nilai r hitung dari tiap item pertanyaan lebih besar dari r table yang berarti bahwa data dinyatakan valid.

Uji Reliabilitas

Uji realibilitas dari masing-masing faktor dengan menggunakan uji Alpha-Cronbach. Batasan nilai minimum alpha dalam penelitian ini adalah 0,60. Kuesioner dinyatakan realibel jika mempunyai nilai koefisien alpha yang lebih besar dari 0,60.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa ketepatan skedul penyusunan anggaran sebesar 0,908 ($>0,60$), sistem pengendalian intern sebesar 0,941 ($>0,60$) dan kinerja pemerintah daerah 0,895 ($>0,60$) sehingga dapat disimpulkan bahwa semua instrumen penelitian yang realibel karena nilai cronbach alpha lebih besar dari nilai koefisien alpa 0,60. Berarti variabel yang digunakan sudah konsisten dan dapat dipercaya.

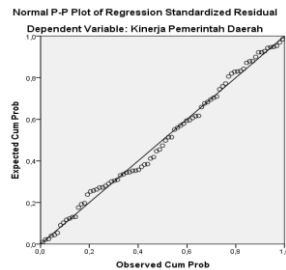
Uji Asumsi Klasik

Hasil Uji Normalitas

Uji normalitas digunakan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel dependen, variabel independen atau keduanya

mempunyai distribusi yang normal. Pada penelitian ini, pengujian normalitasnya dapat dilihat dari normal probably plot dan hasilnya dapat dilihat dari grafik/gambar dibawah ini:

Gambar 2
Grafik Probably Plot



Sumber : Hasil Pengolahan Data SPSS

Untuk menguji normalitas dalam penelitian ini digunakan juga uji *one sample Kolmogorov-Smirnov*. Dasar pengambilan keputusan dengan menggunakan uji statistik Kolmogorov-Smirnov adalah jika nilai signifikansi unstandardized residual lebih dari 0,05 maka menunjukkan distribusi yang normal sehingga bisa dilakukan regresi dengan model liner berganda.

Berdasarkan uji normalitas dengan Kolmogorov-Smirnov Test diperoleh Asymp.sig.unstandardized residual yang lebih besar dari 0,05 maka dapat disimpulkan data berdistribusi normal.

Hasil Uji Multikolinearitas

Tujuan uji multikolinearitas adalah untuk menguji apakah di dalam model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel independen. Jika variabel independen saling berkorelasi, maka

variabel-variabel ini tidak orthogonal (Ghozali,2011).

Tabel 2
Hasil Uji Multikolinearitas

Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
1 (Constant)		
Ketepatan Skedul Penyusunan Anggaran	.933	
Sistem Pengendalian Internal	.933	1.072

a. dependent variable: kinerja pemerintah

Sumber : Hasil Pengolahan Data SPSS

Hasil Uji Autokorelasi

Uji Autokorelasi bertujuan menguji apakah dalam model regresi linear ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode t-1 (sebelumnya). Cara yang digunakan untuk mendeteksi ada atau tidaknya Autokorelasi dalam penelitian ini dengan menggunakan uji Durbin-Watson (DW test) yang akan didapatkan nilai kritis dL dan Du.

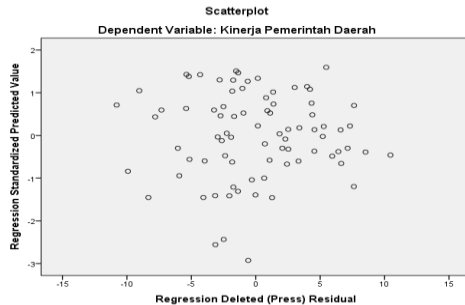
Pada penelitian ini didapat hasil uji Durbin-Watson (DW test) adalah sebesar 1,162 karena nilai angka Durbin Watson (DW) diantara -2 sampai +2, berarti tidak terdapat autokorelasi yang berarti bahwa data ini tidak bisa dan layak untuk digunakan.

Hasil Uji Heterokedastisitas

Tujuan dilakukan pengujian heterokedastisitas adalah untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi kesamaan varians dan residual suatu periode pengamatan ke periode pengamatan yang lain. Heterokedastisitas ini dapat dideteksi dengan melihat ada tidaknya pola tertentu pada grafik *scatterplot*. Jika

titik-titik pada *scatterplot* membentuk pola tertentu berarti regresi mengalami gangguan.

Gambar 3



Sumber : Hasil Pengolahan Data SPSS

Hasil Analisis Regresi Linear Berganda

Untuk melihat pengaruh ukuran perusahaan, *leverage*, dewan komisaris independen, kepemilikan institusional dan kepemilikan manajerial terhadap manajemen laba maka digunakan analisis regresi linear berganda. Hasil analisis regresi linier berganda dapat dilihat pada tabel berikut

Tabel 3
Hasil Analisis Regresi Berganda
Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	12,130	3,795		3,227	,002
Ketepatan Skedul Penyusunan Anggaran	,442	,114	,352	3,874	,000
Sistem Pengendalian Internal	,154	,032	,443	4,884	,000

Sumber : Hasil Pengolahan Data SPSS
Berdasarkan Tabel diatas, persamaan regresi yang dihasilkan adalah:

$$\text{Kinerja Pemerintah Daerah} = 12,130 + 0,442\text{KSPA} + 0,154\text{SPI} + e$$

Hasil Uji Hipotesis

Hasil Pengujian Hipotesis Pertama

Hipotesis pertama dari penelitian ini adalah apakah terdapat pengaruh ketepatan skedul penyusunan anggaran terhadap kinerja pemerintah daerah.

Tabel 4

t _{hitung}	t _{tabel}	Sig.	Keterangan
3,874	1,99	0,00	Ha ₁ diterima

Sumber : data olahan, 2016

Dari tabel tersebut diketahui nilai t_{tabel} sebesar 1,99 pada tingkat signifikansi 5%. Berdasarkan uji regresi, diketahui nilai t_{hitung} sebesar 3,874 dengan signifikansi 0,00. Dengan demikian t_{hitung} (3,874) > t_{tabel} (1,99) dengan signifikansi (0,00) < (0,05). Jadi dapat disimpulkan bahwa **Ha₁ diterima**. Hal ini menunjukkan bahwa ketepatan skedul penyusunan anggaran berpengaruh signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah.

Hasil Pengujian Hipotesis Kedua

Hipotesis kedua dari penelitian ini adalah apakah terdapat pengaruh sistem pengendalian intern terhadap kinerja pemerintah daerah.

Tabel 5

t _{hitung}	t _{tabel}	Sig.	Keterangan
4,884	1,99	0,00	Ha ₂ diterima

Sumber : Hasil Pengolahan Data SPSS

Dari tabel tersebut diketahui nilai t_{tabel} sebesar 1,99 pada tingkat signifikansi 5%. Berdasarkan uji regresi, diketahui nilai t_{hitung} sebesar 4,884 dengan signifikansi 0,00. dengan demikian t_{hitung} (4,884) > t_{tabel}

(1,99) dengan signifikansi (0,00) < (0,05). Jadi dapat disimpulkan bahwa **Ha₂ diterima**. Hal ini menunjukkan bahwa sistem pengendalian intern berpengaruh signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah.

Hasil Uji F

Uji F adalah pengujian signifikansi persamaan yang digunakan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh variabel bebas (secara bersama-sama terhadap variabel tidak bebas (Y) yaitu ketepatan skedul penyusunan anggaran dan sistem pengendalian internal terhadap kinerja pemerintah daerah.

Tabel 6
ANOVA^a

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	1035,692	2	517,846	26,073	,000 ^b
Residual	1549,197	78	19,862		
Total	2584,889	80			

a. Dependent Variable: Kinerja Pemerintah Daerah

b. Predictors: (Constant), Sistem Pengendalian Intern, Ketepatan Skedul Penyusunan Anggaran

Sumber : Hasil Pengolahan Data SPSS

Tabel 6 menunjukkan bahwa nilai $F = 26,073$ pada $p < 0,05$, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa ketepatan skedul penyusunan anggaran dan sistem pengendalian intern secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah.

Hasil Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi menunjukkan besarnya persentase variabel independen (Ketepatan Skedul Penyusunan Anggaran dan Sistem Pengendalian Intern) dapat menjelaskan variabel dependen (Kinerja Pemerintah Daerah). Nilai koefisien determinasi adalah antara 0 dan 1. Nilai R^2 yang kecil berarti

kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen amat terbatas. Nilai yang mendekati satu berarti variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen.

Berdasarkan hasil olah data, diperoleh R Square (R^2) sebesar 0,401 (40,1%). Dengan demikian Ketepatan Skedul Penyusunan Anggaran dan Sistem Pengendalian Internal hanya dapat menjelaskan varian Kinerja Pemerintah Daerah sebesar 40,1%. Sedangkan sisanya sebesar 59,9% dipengaruhi oleh faktor-faktor lain

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan analisis data dan pembahasan yang telah dilakukan maka dapat diambil kesimpulan, yaitu hasil pengujian hipotesis pertama menunjukkan bahwa variabel ketepatan skedul penyusunan anggaran memiliki pengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah. Artinya, semakin tepat waktu penyusunan anggaran maka semakin baik kinerja pemerintah daerah di Kabupaten Siak. Sedangkan hasil pengujian hipotesis kedua menunjukkan bahwa sistem pengendalian internal memiliki pengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah. Artinya, semakin baik sistem pengendalian internal maka semakin baik pula kinerja pemerintah daerah di Kabupaten Siak.

Saran

Saran-saran yang dapat diberikan oleh peneliti bagi

kesempurnaan peneliti selanjutnya yaitu:

1. Penelitian selanjutnya mungkin dapat mempertimbangkan untuk menggunakan objek penelitian yang lebih luas dengan ruang lingkup Provinsi (tingkat I).
2. Penelitian selanjutnya hendaknya mempertimbangkan beberapa variabel lain yang mungkin mempengaruhi Kinerja Pemerintah Daerah.
3. Objek penelitian selanjutnya sebaiknya lebih luas cakupan satuan kerjanya karena satuan kerja yang lebih luas diharapkan dapat memungkinkan klasifikasi yang berbeda.

DAFTAR PUSTAKA

- Bastian, Indra, 2006, *Akuntansi Sektor Publik: Suatu Pengantar*, Erlangga, Jakarta.
- Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO). 2008. *Pengendalian Internal & Manajemen Risiko*. Jakarta: Yayasan Pendidikan Internal Audit (YPIA).
- Ghozali, Imam. 2011. *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 19 (edisi kelima)*. Semarang: Universitas Diponegoro.
- Hansen, Don R, dan M.M. Mowen. 2000. *Management Accounting*. 5th Edition. South-Western College Publishing.
- Indriantoro, Nur., Bambang Supomo, 2009. *Metodologi Penelitian Bisnis untuk Akuntansi dan Manajemen*. Edisi Pertama. Yogyakarta : BPFE Yogyakarta.
- Mahsun, Mohammad. 2006. *Pengukuran Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta: BPFE Yogyakarta.
- Mulyadi. 2001. "Akuntansi Manajemen". Yogyakarta : BPFE UGM.
- Rivai, Vethzal & Basri. 2005. *Performance Appraisal: Sistem yang tepat untuk Menilai Kinerja Karyawan dan Meningkatkan Daya Saing Perusahaan*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Rohman, Abdul. 2007. *Pengaruh Peran Manajerial Pengelola Keuangan Daerah dan Fungsi Pemeriksaan Intern Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah*. Skripsi. Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro.
- Siegel G, dan Marconi, H.R. 1989. *Behavioral Accounting*. South Western Publishing Co.
- Sujarweni, Wiratna. 2015. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press Yogyakarta.
- Wangi, Chitra Ariesta P., dan Ritonga, Irwan T. 2010. *Identifikasi Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya*

*Keterlambatan Dalam
Penyusunan APBD (Studi
Kasus Kabupaten Rejang
Lebong Tahun Anggaran
2008-2010). Simposium
Nasional Akuntansi XIII
Purwokerto.*

Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 59 Tahun 2007
tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor
46/PMK.02/2006 tentang
Tata Cara Penyampaian
Informasi Keuangan Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 60
tahun 2008 tentang Sistem
Pengendalian Intern
Pemerintah.

<http://keuda.kemendagri.go.id/>